

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN PANGAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KABUPATEN BONE)

A. Suwandira Putra<sup>1</sup>, Muh. Arafah<sup>2</sup>, Masyhuri<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone<sup>1,2,3</sup>

[1putraandisuwandira@gmail.com](mailto:1putraandisuwandira@gmail.com)

[3masyhuri.akuntansi@gmail.com](mailto:3masyhuri.akuntansi@gmail.com)

Received: 05-05- 2025

Revised: 18-05-2025

Approved: 26-05-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan pangan dalam perspektif ekonomi Islam di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat Dinas Ketahanan Pangan, pelaku usaha sektor pangan, dan masyarakat atau petani. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di kabupaten Bone aspek yang lebih dominan yaitu produksi dan distribusi pada bidang pertanian dengan menerapkan konsep pengelolaan pangan yang baik, pengelolaan pangan yang di maksud yaitu pada pertanian masyarakat yang ada di kabupaten Bone dan masyarakat dapat menikmati akses pangan yang cukup dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan pada bidang pertanian. Selanjutnya pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan sumber daya alam. Program-program yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan, penerapan teknologi informasi seperti FSVA, serta pemberdayaan masyarakat terbukti mendukung ketahanan pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, perubahan iklim, serta kesenjangan akses pasar bagi petani. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem pangan yang mandiri dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Ketahanan Pangan, Optimalisasi, Pengelolaan Pangan, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang harus dikelola dengan bijak untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Syukron & Adinugraha, 2024). Pangan menjadi masalah yang sangat krusial, terutama di Kabupaten Bone, di mana ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan di daerah ini menjadi prioritas penting, dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk seluruh lapisan masyarakat (Saputra, 2025). Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umum dan mencegah terjadinya krisis pangan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Bone.

Peta Ketahanan Pangan Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia masih belum mencapai status ketahanan pangan yang layak. Beberapa tahun terakhir, pangan di Indonesia juga seringkali mengalami tantangan, seperti kelangkaan dan fluktuasi harga. Pertanian dalam negeri perlu di prioritaskan untuk menciptakan ketahanan pangan mandiri dan tidak bergantung pada impor beras dari negara lain (Azizah & Ratnasari, 2023).



### Gambar 1. Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA Nasional 2023

*Sumber: FSVA Nasional 2023*

Pembangunan pertanian di daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat bukan hanya dari pemerintah. Dengan melibatkan petani dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan, maka akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut. Selain itu, pendidikan tentang praktik pertanian berkelanjutan dan kesadaran akan pentingnya nutrisi juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan pangan yang efektif di tingkat lokal (Saputra, 2025).

Ketahanan pangan merupakan elemen kunci dalam pembangunan wilayah, karena berperan dalam menjamin ketersediaan, kemudahan akses, serta pemanfaatan pangan yang memadai, aman, dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan pangan dan gizi telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional karena memiliki keterkaitan erat dengan keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta menjadi tantangan besar yang juga dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Isu pangan dan gizi sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian ketahanan pangan dan gizi juga mencerminkan kualitas kesehatan individu maupun komunitas, serta menjadi dasar dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia yang pada akhirnya menentukan daya saing suatu bangsa. Ketahanan pangan tercapai ketika seluruh individu, setiap waktu, memiliki kemampuan fisik, sosial, dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang memadai, aman, dan bergizi guna menunjang kehidupan yang sehat dan produktif (Nasrudin, 2022).

Agama Islam memainkan peran sentral dalam membentuk norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor pertanian. Dengan memperhatikan aspek syariah dalam pertanian, masyarakat bisa memastikan bahwa praktik pertanian mereka berada dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penerapan prinsip ekonomi syariah memadukan antara prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan dan kemaslahatan antar sesama (Syukron & Adinugraha, 2024). Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Al-Maidah:2) (Rahman, Tanjung, Ibdalsyah, 2022).

Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan tercapainya keadilan sosial. Nilai-nilai utama, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan, menjadi landasan dalam membangun sistem pengelolaan pangan yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga etis dan berorientasi jangka panjang (Hartati, Putri, dan Hayati, 2024). Di Kabupaten Bone, pendekatan ini berpotensi untuk mendorong pemerataan distribusi pangan serta menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat terhadap pangan yang layak dan berkualitas. Ekonomi syariah juga menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif, di mana sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pertanian, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan bersama (Oktapiansyah et al., 2024).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ditemukan informasi bahwa sistem informasi yang diterapkan untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kerawanan pangan di daerah menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* yang merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap ketersediaan dan kerawanan pangan. Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek pengelolaan pangan dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukron pada tahun 2024, mengungkapkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pertanian padi memberikan kebaikan dengan menerapkan tiga prinsip utama yaitu, prinsip ketuhanan, keadilan, dan kebebasan (Syukron & Adinugraha, 2024). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sarah Salsabila tahun 2019 mengungkapkan bahwa manajemen risiko berbasis syariah dalam konteks ketahanan pangan dapat meningkatkan strategi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi risiko, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pangan yang berkelanjutan (Salsabila, 2019)

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melengkapi berbagai informasi dan penelitian sebelumnya yang belum cukup tentang optimalisasi pengelolaan pangan dalam pendekatan ekonomi Islam dengan fokus di Kabupaten Bone. Selain itu, masih belum ada penelitian terdahulu yang relevan mengkaji pengelolaan pangan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan transparansi. Sehingga hal tersebut menjadi model kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini sebagai fokus pembahasan.

## **METODE PENELITIAN**

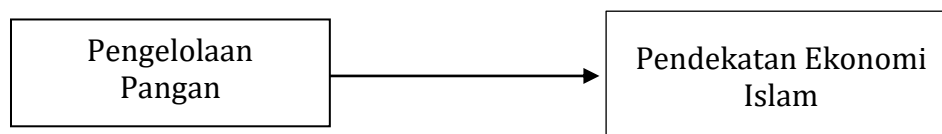
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada pengelolaan pangan di Kabupaten Bone melalui perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika pengelolaan pangan dalam konteks nyata, serta menggali berbagai pandangan dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, khususnya di Dinas Ketahanan Pangan dan pelaku usaha sektor pangan dengan waktu penelitian berlangsung selama empat bulan. Sumber data utama dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan responden secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap topik yang dikaji. Objek penelitian meliputi pejabat Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Bone, pelaku usaha sektor pangan, dan tokoh masyarakat atau petani. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi-informasi mengenai pengelolaan pangan. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami praktik pengelolaan pangan dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan tersebut. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan dinas, data statistik, dan dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait ketahanan pangan.

Teknik analisis data pertama yang digunakan yakni reduksi data, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi. Kedua, penyajian data, untuk menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Suprayogo, 2001). Dan ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis (Rasyid, 2000).

Gambar 2. Alur Penelitian



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Pengelolaan Pangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pengelolaan pangan dalam perspektif ekonomi Islam berperan penting dalam pendistribusian pangan yang merata bagi masyarakat. Pengelolaan pangan merujuk pada strategi dan praktik yang digunakan untuk mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan pangan yang baik bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas bagi masyarakat, serta mengurangi risiko kelangkaan pangan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan produksi, pengelolaan rantai pasok, peningkatan kualitas pangan, dan pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep pengelolaan pangan yang tepat, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### a. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Jika ketahanan pangan tercapai, masyarakat dapat menikmati akses pangan yang cukup dan berkualitas, sehingga meningkatkan kesehatan dan produktivitas. Namun, jika ketahanan pangan tidak tercapai, masyarakat dapat mengalami kelaparan dan malnutrisi, penurunan produktivitas, dan kemiskinan yang semakin parah. Selain itu, pengelolaan pangan yang tidak berkelanjutan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan biodiversitas. Oleh karena itu, ketahanan pangan sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Ketahanan Pangan, diketahui bahwa kebijakan pengelolaan pangan sudah diarahkan untuk mewujudkan distribusi yang lebih merata, transparansi dalam rantai pasok, serta penguatan cadangan pangan dengan menggunakan instrumen teknologi

informasi seperti *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*.

b. Pelaku Usaha Sektor Pangan

Pelaku usaha sektor pangan berperan penting dalam menyediakan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Mereka harus memperhatikan aspek keamanan pangan, higiene, dan kualitas produk untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan pasar. Namun, pelaku usaha sektor pangan juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak menjalankan usahanya dengan bertanggung jawab, seperti pencemaran lingkungan, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan eksploitasi pekerja.

Seperti halnya dalam wawancara pelaku usaha sektor pangan mengungkapkan bahwa kendala terbesar dalam distribusi dan pemasaran pangan di Kabupaten Bone adalah infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan biaya logistik yang tinggi dan penurunan kualitas produk sebelum sampai ke pasar, yang kemudian berpengaruh pada harga jual di tingkat petani. Oleh karena itu, pelaku usaha sektor pangan perlu menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, keamanan pangan, dan tanggung jawab sosial untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

c. Masyarakat dan Petani Pangan

Masyarakat dan petani pangan merupakan dua kelompok yang sangat terkait dengan ketahanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen memiliki dampak pada ketahanan pangan melalui pilihan konsumsi dan perilaku pembelian, sedangkan petani pangan sebagai produsen memiliki dampak pada ketersediaan dan kualitas pangan. Dari sisi masyarakat dan petani, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pangan meliputi penggunaan teknologi pertanian yang masih tradisional, keterbatasan akses ke pasar yang adil, serta fluktuasi harga yang sering merugikan petani kecil. Masyarakat dan petani juga menyadari pentingnya penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan hasil pertanian, tetapi masih diperlukan penguatan pemahaman serta pendampingan agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat lebih optimal diterapkan dalam seluruh proses produksi dan distribusi

## 2. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Pengelolaan Pangan di Kabupaten Bone.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan pengelolaan pangan di Kabupaten Bone dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti meningkatkan produksi pangan halal, mengembangkan sistem distribusi pangan yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan pangan yakni, prinsip keadilan tampak melalui upaya distribusi pangan yang merata, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat mengakses pangan secara adil. Prinsip transparansi diwujudkan dalam pengelolaan informasi terkait ketersediaan dan distribusi pangan, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi seperti *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Sedangkan tanggung jawab sosial diterapkan melalui program pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan berbasis syariah, dan

pengembangan dana zakat serta wakaf produktif yang mendukung keberlanjutan sektor pangan. Prinsip halal dan thayyib juga memastikan bahwa pangan yang dihasilkan tidak hanya halal tetapi juga baik untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan, pelaku sektor pangan, dan masyarakat atau petani yang dilakukan oleh peneliti, bahwa diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan para petani dalam upaya meningkatkan produksi pangan yang berkualitas serta mengembangkan sistem distribusi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penting pula untuk memberikan dukungan kepada petani melalui pelatihan, bantuan keuangan, dan akses pasar yang lebih baik. Masyarakat juga mengungkap adanya beberapa kendala, khususnya terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai prinsip keuangan syariah dan penghindaran riba. Banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami konsep dasar ekonomi Islam, sehingga dalam praktik pengelolaan pangan masih ditemukan unsur-unsur transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai syariah.

Oleh karena itu, untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan pangan, diperlukan peningkatan literasi masyarakat, perbaikan infrastruktur, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya pangan secara kolektif, pembentukan koperasi berbasis syariah bagi petani, serta penerapan prinsip pembiayaan yang bebas riba dalam mendukung pengembangan sektor agrikultur.

## KESIMPULAN

Bahwa optimalisasi pengelolaan pangan dengan pendekatan ekonomi Islam di Kabupaten Bone telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pangan yang diterapkan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran pangan yang dilakukan secara adil, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Berbagai program yang dijalankan, seperti pemanfaatan lahan pekarangan, pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan berbasis syariah, serta penerapan teknologi informasi melalui *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), semakin mendorong tercapainya sistem pengelolaan pangan yang lebih optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. dill N., & Ratnasari, V. (2023). *Pemodelan Status Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Menggunakan Regresi Probit Ordinal*. 12 (2).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v12i2.113044>
- Hadijah. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Keuangan serta Motivasi terhadap Kinerja Guru di SMAN 68 Jakarta Pusat. *Cakrawala Management Business Journal*, 2.
- Hartati, E. Y., Putri, M. J., & Hayati, M. (2024). *Peran Ekis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , Indonesia green economy , serta mengeksplorasi*

- bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan berkelanjutan , sehingga tercipta s. 2, 203.* <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1042>
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–61.
- Oktapiansyah, R., Sari, N., Carlina, A., Wahyu, B. A., Melinda, D., Agustina, S., Andalena, M., Oktalia, T., Hasanah, M., & Bella, R. (2024). *Sinergi Efektif Karang Taruna dan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Tumbuhan Yang Maju*. 2(2), 159–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/annafah>
- Rahman, R. M., Tanjung, H., & Ibdalsyah. (2022). Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(5), 1147–1166. <https://doi.org/1047467/elmal.v3i5.1988>
- Rasyid, H. (2000). Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama. *Pontianak: STAIN Pontianak*. 71.
- Rumawas, V., Nayoan, H., & Kumayas, H. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1–12.
- Salsabila, S. (2019). Analisis Pengelolaan Ketahanan Pangan Masyarakat Tani menurut Manajemen Risiko Syariah Studi di Desa Mee Tanjong Usi Kabupaten Pidie (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Saputra, R. (2025). *Implementasi kebijakan pemerintah kabupaten aceh selatan dalam bidang pertanian*. 6.
- Suprayogo, I. Tobroni (2001) Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: Remaja Rosdakarya. 194
- Syukron, M., & Adinugraha, H. H. (2024). Strategi Peningkatan Hasil Pertanian Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pertanian Padi Di Desa Ngalian). *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10, 1–13.
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). *Transparansi dan kepentingan umum*. 19(1), 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.61>